

# JURNAL PROMARK

*Sekolah Administrasi Bisnis  
dan Keuangan*



## Institut Manajemen Telkom

Jurnal ProMARK	Tahun II	Edisi I	Halaman 01-60	ISSN 2086-4175	Bandung 2011
----------------	----------	---------	------------------	-------------------	-----------------

**Pentingnya Manajemen Tepat Guna dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan  
Berbasis Multikultural terhadap Sikap Nasionalisme**

**Oleh : M.Yahya Arwiyah<sup>6</sup>**

**ABSTRACT**

*Awareness is built through a learning-based multicultural citizenship is expected not only to enrich the national culture but also has a touch sensitive roots of humanity in equality and diversity, which in turn will achieve an integration of the nation that was built by a sense of belonging and a sense of solidarity: Sense of belonging grown must continue to develop among the students to aim at self-awareness as individuals, ethnic or nation. While a sense of solidarity was built by shared social opportunities and responsibilities.*

*Indonesian nationalism is an integrative nationalism, in the sense that no distinction between public or citizens on the basis of the factions or the other, but over all groups and individuals for the unity of all walks of life Diversity is still recognized. Indonesian nationalism is the spirit of nationalism that can unite the Indonesian nation in diversity, and different in unity.*

**Keyword : Indonesian nationalism, multicultural citizenship**

---

<sup>6</sup> Dosen Program Studi D 3 Manajemen Pemasaran dan Kapusbangprof YPT

## Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi ini tidaklah pelak selain tersimpan sejumlah harapan masa depan yang lebih cerah, telah pula membawa bangsa Indonesia memasuki krisis multi dimensi yang disertai oleh munculnya gerakan separatis dan keprihatinan masalah-masalah sosial-budaya lainnya menyangkut disintegrasi bangsa yang lambat laun senantiasa mengikis sikap nasionalisme warga negaranya.

Salah satu dampak krisis secara keilmuan, hampir semua disiplin ilmu dipertanyakan kontribusi "keampuhannya" untuk melakukan *recovery multi crisis* (krisis) tersebut, termasuk peran pembelajaran kewarganegaraan dalam mempertahankan integrasi bangsa dan mengembangkan sikap nasionalisme warga negara. Beberapa pengamat sosial dan pendidikan berpendapat bahwa nasionalisme yang menyangkut integrasi bangsa perlu "direvitalisasi" dalam arti yang luas menyangkut beralihnya pandangan *ahistoris* ke *historis*, berkembangnya ke arah *egalitarian*, *justice*, *clean governance* dan *clean government* yang mepercepat terwujudnya *civil society* agar tidak kehilangan aktualitasnya (Abdullah, 2001: 73; Simatupang, 2002: 45).

Pentingnya perubahan paradigma pembelajaran kewarganegaraan tersebut bukan semata-mata karena adanya gerakan reformasi yang terjadi belakangan ini, gerakan reformasi itu sendiri hanyalah sebagai faktor pemicu terjadinya kearah itu.

Namun kondisi Indonesia yang merupakan negara majemuk dan heterogen, karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, agama, dan keyakinan dengan berbagai macam kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan. Menuntut keanekragaman atau kemajemukan agar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi kekuatan dan kekayaan. Oleh karena itu kehidupan sebagai bangsa dengan keanekaragaman itu akan memberikan warna-warni dalam budayanya, memberikan kesempatan untuk mengapresiasi berbagai kemampuan yang hasilnya dapat saling memperkaya, dan puncak-puncak kemampuannya akan memberi makna, yang tidak sedikit bagi perkembangan dan kemajemukan Indonesia yang diwarnai oleh dimensi multicultural .

Pembahasan integrasi bangsa, tidak lagi menjadi *determinant* kajian politik yang selama ini sering "diambil alih negara", kurang mementingkan jenis kesadaran yang dibangun oleh nasionalisme dan integrasi bangsa dari bawah oleh masyarakat atau *popular nationalism and nations integration* (Abdullah, 2001: 72). Kesadaran semacam ini mengabaikan faktor keragaman dan penghargaan akar sosial-budaya bersifat *multicultural* yang menuntut kewajaran dan kesamaan dalam keluarga bangsa yang selama ini tidak terakomodasi.

Berkaitan dengan hal tersebut Suparlan, (2002: 99; 2003: 35) mengemukakan bahwa:

Multikulturalisme pada hakekatnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitis yang

memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri dan secara timbal-balik mengembangkan sikap-sikap antar kelompok yang positif demi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan masyarakat.

Proses untuk menapaki jalan menuju pengakuan tersebut, adalah sebuah pendakian yang terjal, dan sikap terhadap realitas multikultural masyarakat/bangsa mengalami fluktuasi perkembangan sepanjang sejarah.

Terkait dengan pengembangan realitas multikultural masyarakat/bangsa yang mengalami fluktuasi, peran penting pendidikan menjadi tak terelakan. Dalam pandangan Azra (2006:153) pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung.

Pembelajaran kewarganegaraan sebagai unsur pengembangan nasionalisme kultural sangat berfungsi untuk menjadi mediasi dalam memantapkan hubungan antara unsur-unsur masyarakat plural. Anderson (1983: 12-16, dalam Supardan, 2002) menyebutkan arti penting identitas nasional dan perkembangan kesadaran nasional. Vanderburg (1985: 272 dalam Supardan,

2002) menambahkan bahwa selain itu melalui pembelajaran kewarganegaraan, juga berupaya membentuk model-model perilaku yang memupuk nasionalisme kultural untuk menciptakan pola hubungan yang mengatasi lingkungan temporal dan spasial serta dimensi-dimensi lainnya.

Kesadaran yang dibangun melalui pembelajaran kewarganegaraan yang berbasis multikultural diharapkan bukan hanya dapat memperkaya budaya bangsa akan tetapi juga memiliki kepekaan sentuhan-sentuhan akar kemanusiaan dalam kesetaraan/persamaan dan keragaman, yang pada gilirannya akan tercapai suatu integrasi bangsa yang dibangun oleh rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa solidaritas (*sense of solidarity*). *Sense of belonging* harus terus ditumbuh kembangkan di kalangan para siswa untuk menuju kepada *self awareness* sebagai individu, etnis atau bangsa. Sedangkan rasa solidaritas (*sense of solidarity*) dibangun oleh *shared social opportunities and responsibilities*, dengan menekankan pada azas pemerataan dan keadilan (Wiraatmadja, 2002: 228).

Pertimbangan integrasi bangsa Indonesia belakangan ini sedang mengalami titik lemah yang memprihatinkan, telah mendorong penulis untuk dapat mengkaji makalah dengan judul: **Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Implikasinya terhadap Sikap Nasionalisme.**

**Pentingnya Manajemen Tepat Guna dalam proses Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural terhadap Sikap Nasionalisme.**

Pembelajaran Pendidikan Kewarga negaraan jelas memiliki pengaruh yang besar terhadap integrasi bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan masih memegang peranan yang strategis dalam memupuk jiwa nasionalisme, dan bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi secara *futurologist* bagi kelanjutan pembangunan bangsa. Spirit atau ethos itu masih tetap diperlukan, bahkan akan lebih diperlukan mengingat makin majunya teknologi informasi yang ditandai adanya akslerasi mondialisasi ataupun universalisasi (Kartodirdjo, 1999: 25). Kesemuanya itu membutuhkan pemantapan nilai-nilai dasar yang membentenginya sebagai bangsa. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakekatnya juga merupakan unit geopolitik yang mewujudkan proses-proses kehidupan bangsa dalam totalitasnya terutama untuk integrasi bangsa. Adapun fungsi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut terutama untuk menerangkan eksistensi ataupun sosiogenesis negara-*nation* kita.

Pengembangan warganegara multikultural senantiasa mensyaratkan dimilikinya sikap nasionalisme sebagai kemampuan-kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh setiap warganegara, yang menuntut komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat

kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada dengan pendapat diatas, M. Said dan Junimar Affan (1987:272) menyatakan bahwa:

Nasionalisme adalah rasa kebangsaan berupa keinsyafan untuk mengabdikan dan bersatu buat negara, karena terikat oleh perasaan yang bersumber pada jiwa, dinyatakan oleh persatuan bahasa, adat dan tujuan yang sama.

Kansil (1986:20) menyatakan bahwa salah satu kriteria kekuatan bangsa adalah nasionalisme (rasa kebangsaan) dalam arti kesadaran loyalitas pada kebangsaannya.

Memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, makna sikap nasionalisme lebih menitikberatkan kepada keadaan jiwa yang berupa keinsyafan dan kesadaran berbangsa sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena kesamaan sejarah, kebersamaan kepentingan, rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu, kini dan akan datang. Sikap nasionalisme juga diwarnai dengan kesamaan pandangan, harapan tujuan, budaya, bahasa, cita-cita dan kecintaan kepada tanah air. Dengan kata lain, sikap nasionalisme adalah perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri sebagai bangsa. Sikap nasionalisme tidaklah dapat dinyatakan

adanya, hanya dapat diketahui gejala dan bukti keberadaannya.

Para dosen dituntut untuk harus mulai membangun sebuah kesadaran bahwa kita adalah sebuah bangsa yang majemuk, beda suku, agama, golongan politik, maupun kepentingan. Akan tetapi, kemajemukan itu jangan lantas ditempatkan sebagai sebuah *handicap*, tapi modal dasar bahwa untuk bisa berjalan bersama kesatu tujuan dibutuhkan sikap saling percaya, saling bantu dan saling menghargai. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Utomo (1995: 30) tentang nasionalisme Indonesia (merujuk kepada konsep Negara Integralistik Soepomo), bahwa:

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti yang tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan-golongan atau yang lainnya, melainkan mengatasi segala golongan dan perorangan untuk persatuan semua lapisan masyarakat Keanegaraman itu tetap diakui. Singkatnya nasionalisme Indonesia merupakan semangat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan (Bhineka Tunggal Ika).

Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa seluruh bangsa Indonesia harus membina persatuan dan kesatuan bangsa serta antar seluruh warga negara Indonesia yang berasas

satu tekad yang bulat dan satu cita-cita nasional yang sama tanpa memandang asal-usul, keturunan, suku, daerah, golongan, kebudayaan, agama dan kepercayaan serta perbedaan-perbedaan yang lainnya.

Sebagai akhir dari renungan kita renungan kita dalam memakai kembali akan arti dari nasionalisme, alangkah baiknya kita mencoba belajar pada bangsa-bangsa besar di dunia. Kebesaran suatu bangsa salah satunya bisa dilihat dari bagaimana sikap mereka menghargai seluruh jerih payah dari perjuangan yang dilakukan para pendahulunya. Penghargaan itu kemudian di implementasikan dalam bentuk tindakan-tindakan positif dan konstruktif demi kemaslahatan bangsanya. Ini penting untuk kita lakukan secara bersama, karena tentunya kita semuanya yang merasa memiliki dan mencintai Republik ini tidak mau kalau suatu nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tinggal menjadi kenangan sejarah saja, sebagaimana yang pernah dialami oleh Majapahit dan Sriwijaya dimasa lalu.

Nasionalisme berasal dari kata "*nation*". Nation berasal dari kata "*natio*" yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bangsa yang dipersatukan karena persamaan kelahiran. Secara etimologis *natio* berasal dari kata "*nasci*" yang berarti dilahirkan. Nation atau bangsa menurut Renan adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Sedangkan M. Said dan Junimar Affan (1987:272) menyatakan nasionalisme adalah rasa kebangsaan berupa keinsyafan untuk mengabdikan dan bersatu buat negara, karena

terikat oleh perasaan yang bersumber pada jiwa, dinyatakan oleh persatuan bahasa, adat dan tujuan yang sama.

Menurut Sarjono Poespawardojo (1995: 116) nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menyatakan loyalitas tertinggi terhadap masalah-masalah duniawi dari setiap negara yang ditujukan kepada negara bangsa.

Memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, makna sikap nasionalisme lebih menitikberatkan kepada keadaan jiwa yang berupa keinsyafan dan kesadaran berbangsa sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena kesamaan sejarah, kebersamaan kepentingan, rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu, kini dan akan datang.

Jadi pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural senantiasa memberikan implikasi yang positif dalam mengembangkan sikap nasionalisme. Karena didalam pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural, didalam diri siswa senantiasa ditanamkan kesamaan pandangan, harapan tujuan, budaya, bahasa, cita-cita dan kecintaan kepada tanah air. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dapat dijadikan sebagai perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri sebagai bangsa.

## Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural senantiasa memberikan implikasi yang positif dalam mengembangkan sikap nasionalisme. Karena didalam pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural, didalam diri siswa senantiasa ditanamkan kesamaan pandangan, harapan tujuan, budaya, bahasa, cita-cita dan kecintaan kepada tanah air. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dapat dijadikan sebagai perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri sebagai bangsa.

## Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik (2001) *Nasionalisme & Sejarah*, Bandung: Satya Historika.
- Aly, A. (2005). "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik". Makalah dipresentasikan pada "Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman", yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
- Azra, A. (2006). "Demokrasi Multikultural". *Harian Republika*, 12 Agustus 2004.
- Blum, L.A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Terjemahan oleh Sintia Carolina dan Dadang Rusbiantoro dari judul asli *Applied Ethics: A Multicultural Approach*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.
- Cholisin, dkk. (2007). *Ilmu Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Cogan, J.J. and Ray Derricott (eds). (1998). *Citizenship for The 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Poespowardojo, Soerjanto. (1995). *Menuju Integrasi Bangsa Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Sejarah, 8. LP3ES.
- Renan, Ernest. (1990). "What Is A Nation ?" dalam *Nation and Narration*. Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge.
- Simatupang, Maurits. (2002). *Budaya Indonesia yang Supraetnis*. Jakarta: Sinar Sinanti.
- Somantri, Nu'man. (1976). *Metode Mengajar Civics*. Jakarta: Erlangga.
- (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Supardan, Dadang. (2002). "Keberhasilan Kebijakan Multikulturalisme Kanada dan Tantangannya: Studi Hak Azasi Manusia dalam Perspektif Global", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS)*, Bandung: FPIPS UPI.
- Supardan, Parsudi. (2002). "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural".

Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI, No.69, UI dan Yayasan Obor Indonesia.

Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Udin S. Winataputra. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan [PKn] sebagai Pendidikan Disiplin Ilmu: Tantangan Epistemologis dan Implikasi Pedagogis*. Tersedia di [www.depdiknas.go.id/jurnal/45/udin\\_s\\_winataputra.htm](http://www.depdiknas.go.id/jurnal/45/udin_s_winataputra.htm).

Wahab, Abdul Azis. (2001). *Implementasi dan Arah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia*. Bandung: Civicus Jurnal Ilmu Politik, Hukum dan PKn Edisi I.

----- (2007). *Catatan Mata Kuliah Landasan dan Teori PKn*. Sekolah Pascasarjana Program Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Winataputra, U.S. dan Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.

Wiriaatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.

**Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.